

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2017

2.1 Evaluasi pelaksanaan Rencana Bappeda dan Capaian Indikator semester I
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD
2.3 Isu penting penyelenggaraan Tupoksi
2.4 Review Rancangan RKPD

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2017 dan Capaian Indikator sampai dengan Semester I

Rencana Kerja (Renja) suatu OPD adalah Penjabaran Perencanaan tahunan dari Renstra OPD. Renja suatu OPD memuat program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pagu indikatif dan prakiraan maju. Program dan kegiatan yang tercantum

dalam Renja meliputi program dan kegiatan yang sedang berlangsung dan kegiatan alternatif atau baru.

Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan. Laporan Kinerja adalah ihktisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD. Kinerja sendiri dapat dijelaskan sebagai keluaran/ hasil dari kegiatan/ program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Untuk mengukur kinerja itu sendiri diperlukan indikator kinerja yang merupakan alat ukur untuk pencapaian suatu suatu kebijakan/ program/ kegiatan dan sekaligus merupakan alat ukur untuk mengevaluasi dan menilai kinerja sebuah entitas.

Sebagai penjabaran dari perencanaan tahunan dokumen Rencana Strategis OPD, Rencana Kerja (Renja) OPD memiliki peran yang penting dalam memberikan arah terhadap Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) khususnya dalam perubahan Renja Kota Magelang Tahun 2017. Sesuai dengan Permendagri 54 Tahun 2010, salah satu evaluasi yang harus dilakukan aadalah evaluasi hasil pelaksanaan atas rencana Kerja OPD yang telah disusun sebelumnya. Kriteria penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan.

Sedangkan laporan keuangan merupakan laporan pertanggung jawaban keuangan yang berbentuk laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Ketentuan mengenai bentuk laporan keuangan tersebut telah diatur dalam PP No.24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pengukuran laporan kinerja dilakukan dengan menggunakan konsep *Value for Money*. Dalam konsep ini diperlukan indikator input (masukan) output

(keluaran), dan outcome (hasil). Secara rinci indikator-indikator tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Secara keseluruhan capaian kinerja fisik kegiatan sampai dengan semester 1 tahun anggaran 2017 relatif masih rendah. Dari Target fisik **65.40%** pada semester 1 tahun anggaran 2017, terealisasi sebesar **38.58%** atau hanya separuhnya. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target keluaran yang direncanakan sampai dengan semester I Tahun Anggaran 2017 (dengan rentang/gap di bawah 50% dari target yang ditetapkan), di antaranya:
 - a. Kegiatan Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah;
 - b. Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
 - c. Kegiatan Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor;
 - d. Kegiatan Pemeliharaan rutin berkala meubelair;
 - e. Kegiatan Workshop Perencanaan Pembangunan daerah;
 - f. Kegiatan Penyusunan Profil Daerah;
 - g. Kegiatan Fasilitasi FEDEP;
 - h. Kegiatan Penetapan RKPD;
 - i. Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
 - j. Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Program Setuja Bunga;
 - k. Kegiatan Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);
 - l. Kegiatan Penyusunan Standart Satuan Harga;
 - m. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengembangan Rumah Potong Hewan (RPH) Ber-NKV;
 - n. Kegiatan Pemetaan Potensi Ekonomi Kota Magelang;
 - o. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengembangan Jangkauan Pemasaran dan Skema E-commerce
 - p. Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Bidang Ekonomi;
 - q. Kegiatan Penyusunan Laporan Penanggulangan Kemiskinan (TKPKD)
 - r. Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pendidikan Untuk Semua (PUS);
 - s. Kegiatan Penyusunan Masterplan Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan;
 - t. Kegiatan Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
 - u. Kegiatan Rencana Aksi Daerah Pengarustamaan Gender;
 - v. Kegiatan Review Strategi Sanitasi Kota.

Sedangkan beberapa kegiatan capaian fisiknya masih 0% ada 3 kegiatan, di antaranya:

- a. Pengadaan perlengkapan gedung kantor;
- b. Workshop perencanaan pembangunan;
- c. Pelaksanaan verifikasi Perubahan Renja OPD;

Rendahnya capaian fisik kegiatan apabila dibandingkan dengan target realisasi pada Semester 1 Tahun Anggaran 2017, di antaranya disebabkan oleh:

- a. Ketidaktepatan dalam perencanaan anggaran belanja langsung per triwulan. Hal ini dapat dilihat dari adanya beberapa kegiatan yang sudah di anggarkan pada triwulan pertama padahal kegiatan baru dimulai pada triwulan berikutnya atau bahkan sebaliknya;
 - b. Perencanaan anggaran belanja langsung per triwulan yang terdapat di DPA belum sepenuhnya sesuai dengan *schedull* kegiatan;
 - c. Pelaksanaan kegiatan belum di ikuti oleh serapan dana kegiatan sehingga ada ketimpangan antara capaian realisasi fisik dan capaian realisasi serapan anggaran. Hal ini menyebabkan target serapan anggaran triwulan tidak dapat terserap;
 - d. Perlu kecermatan di dalam menghitung kebutuhan anggaran kegiatan sehingga anggaran kegiatan sesuai dengan kebutuhan/mencukupi kebutuhan pelaksanaan kegiatan dan dalam laporan pertanggungjawaban;
 - e. Terdapat beberapa kegiatan yang secara teknis mengalami perubahan sehingga perlambatan pelaksanaan atau penundaan pelaksanaan setelah Perubahan Anggaran seperti adanya perubahan kebijakan, penyesuaian atau penambahan anggaran kegiatan pada Perubahan Anggaran atau terkait masalah teknis kegiatan yang menyebabkan kegiatan tidak bisa di laksanakan sesuai dengan *schedull* kegiatan yang telah direncanakan.
2. Jika dilihat dari tingkat penyerapan anggaran kegiatan-kegiatan untuk Tahun 2017 sampai dengan triwulan II (realisasi pada akhir bulan Juni 2017) baru mencapai 26.69% atau sebesar Rp.1.229.328.480,- dari total anggaran sebesar Rp. 4.605.497.000,-. Rendahnya capaian realisasi serapan anggaran pada semester 1 atau Triwulan II Tahun anggaran 2017 di sebabkan beberapa hal, di antaranya:
- a. Realisasi fisik kegiatan yang tidak di ikuti dengan realisasi serapan dana kegiatan sehingga terdapat *gap* antara realisasi fisik kegiatan dengan realisasi anggaran. Hal ini menyebabkan serapan anggaran Bappeda Kota Magelang sampai dengan triwulan ke tiga relatif masih kecil (adanya beberapa kegiatan yang serapan anggarannya masih di bawah 10%),
 - b. Adanya pengadaan barang dan jasa yang kegiatannya direncanakan pada penetapan anggaran namun sampai dengan saat ini belum dilaksanakan;
 - c. Terdapat beberapa hal terkait dengan teknis pelaksanaan kegiatan yang menyebabkan kegiatan – kegiatan tersebut tidak bisa dilaksanakan sesuai dengan target dan *schedull* yang telah ditetapkan pada awal tahun kegiatan;
 - d. adanya kegiatan-kegiatan yang menggunakan jasa pihak ketiga, yang sampai dengan bulan September masih dalam proses pengerjaan sehingga Pencairan Belanja Jasa Pihak Ketiga maupun Belanja Jasa Tenaga Ahli/Narasumber akan di cairkan setelah kegiatan tersebut selesai dilaksanakan
 - e. Adanya beberapa kegiatan yang prosesnya baru berjalan pada akhir tahun anggaran

3. Dua kegiatan yang terdapat di dalam Renstra OPD namun tidak dilaksanakan pada Renja OPD Tahun Anggaran 2017 yaitu kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program Pengembangan Perumahan dan Kegiatan Penyusunan Dokumen Rencana Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan (RKP-KP). Hal ini terjadi sebagai tindak lanjut dari ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang kemudian ditindaklanjuti dengan Perubahan Renstra Perangkat Daerah se-Kota Magelang Tahun 2016-2021 yang telah menyesuaikan dengan nomenklatur Perangkat Daerah yang baru. Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 juga telah disahkan dengan Keputusan Walikota Magelang Nomor 050.11/124/112 Tahun 2017 tentang Pengesahan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 pada Pemerintah Kota Magelang. Perubahan Renstra inilah yang kemudian menjadi salah satu dasar penyusunan perubahan renja perangkat daerah tahun 2017.

Perubahan aturan tersebut di atas yang berdampak pada perubahan urusan dan perangkat daerah yang terlibat. Terkait dengan hal tersebut, kewenangan pelaksanaan kegiatan tersebut dilaksanakan oleh OPD lain dan bukan merupakan kewenangan dari Bappeda.

Adapun evaluasi hasil pelaksanaan rencana kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang tahun 2016 adalah sebagaimana tergambar dalam Tabel 2.1 berikut :

TABEL ADA DI EXCEL

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Renja tahun 2017 merupakan tahun pertama perencanaan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang periode 2016 – 2021. Mengingat Renja 2017 yang disusun pada tahun 2016 telah disesuaikan/berpedoman pada Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2016 – 2021. Hal tersebut guna menjaga kesinambungan program pemerintah di urusan pembantu perencanaan pembangunan serta untuk mencapai tujuan Magelang sebagai Kota Jasa yang berbudaya, maju dan berdaya saing dalam masyarakat madani. Tingkat capaian kinerja dalam rangka dukungan terhadap pencapaian visi misi Walikota Magelang. Salah satunya adalah berfokus pada bagaimana menciptakan SDM aparatur yang bersih dan profesional dengan peningkatan kapasitas dan responsifitas .

Bappeda sebagai koordinator perencanaan pembangunan daerah berperan dalam penyusunan pembangunan makro dan integratif seperti RKPD, RPJMD dan RKPD. RKPD beserta dokumen prasyarat yang dibutuhkan. Setiap tahunnya Bappeda melaksanakan penyusunan dokumen RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah) yang merupakan penjabaran dari RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) dengan menampung aspirasi kebutuhan masyarakat melalui musrenbang yang dilakukan dari tingkat kelurahan, kecamatan dan tingkat kota. Selain penyusunan RKPD, Bappeda juga melakukan penyusunan dokumen perencanaan terkait isu-isu yang menjadi tema pembangunan Kota Magelang pada tahun terkait.

Tingkat capaian kinerja yang dilaksanakan oleh OPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam rangka dukungan terhadap pencapaian visi misi Walikota Magelang, program dan kegiatan Bappeda Kota Magelang mendukung pada pencapaian misi pertama, *'Meningkatkan sumber daya manusia aparatur yang berkualitas dan profesional dengan mengoptimalkan kemajuan teknologi sebagai dasar terciptanya pemerintahan daerah yang bersih serta tanggap terhadap pemenuhan aspirasi masyarakat, mampu meningkatkan dan mengelola potensi daerah dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat di dukung partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat'*.

Dalam pencapaian misi pertama, sasaran yang akan di capai adalah a). mewujudkan perencanaan daerah yang partisipatif berbasis data yang akurat dan akuntabel serta b). meningkatkan kemampuan pemerintah mendorong partisipasi masyarakat dan kemitraan. Dalam lima tahun ke depan Bappeda Kota Magelang berupaya untuk mendukung dalam pencapaian kualitas perencanaan pembangunan yang semakin baik sesuai dengan peraturan yang berlaku dan dapat menampung aspirasi kebutuhan riil masyarakat.

Penyusunan Perubahan Renja 2017 berdasarkan pada RKPD Perubahan Tahun 2017 yang mengacu pada RPJMD tahun 2016-2021 dan berpedoman pada perencanaan jangka panjang Kota Magelang sebagaimana tertuang di dalam RPJPD Kota Magelang Tahun 2005-2025, yaitu untuk mencapai tujuan Magelang

sebagai Kota jasa yang berbudaya, maju dan berdaya saing dalam masyarakat madani. Prioritas pencapaian sasaran pembangunan daerah disusun secara seksama mengingat banyaknya program yang harus dijalankan dengan keterbatasan sumber daya baik sumber daya manusia dan sumber daya keuangan untuk pembiayaan pembangunan. Sehingga tidak semua program prioritas dapat menjadi prioritas pembangunan daerah, menyangkut keterbatasan anggaran dan identifikasi masalah. Prioritas pelaksanaan pembangunan di dasarkan pada penyelesaian isu – isu strategis dan tema pembangunan yang telah di susun secara bertahap dalam RPJMD Pemerintah Kota Magelang. Selain itu juga memperhatikan pencapaian indikator kinerja daerah dan indikator kinerja OPD yang telah di tetapkan pada awal tahun perencanaan

Adapun pencapaian target kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Kota Magelang sampai dengan triwulan II tahun 2017 adalah sebagaimana Tabel 2.2 berikut

di EXCEL

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Terbitnya Undang undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan dampak yang begitu nyata dalam jalannya pemerintah daerah. Salah satunya adalah perubahan SOTK daerah yang akan mengacu pada urusan yang dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah.

Mendasarkan pada Undang – Undang tersebut maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang bukan lagi sebagai pemegang urusan perencanaan pembangunan daerah melainkan sebagai urusan penunjang pemerintahan bidang perencanaan daerah. Hal tersebut memiliki *implikasi logis* diantaranya adalah bergesernya program program yang selama ini dilaksanakan oleh Bappeda Kota Magelang termasuk diantaranya urusan tata ruang, urusan perumahan dan persampahan akan berpindah menjadi kewenangan perangkat daerah yang mengemban urusan tersebut.

Munculnya SOTK baru yang mengacu pada Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat daerah dan Peraturan Walikota Magelang nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan, organisasi, tugas dan fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, memberikan warna yang berbeda pada susunan struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang. Perubahan struktur Organisasi berpengaruh pada beban kerja, kewenangan dan indikator kinerja yang akan di tuangkan di dalam dokumen perencanaan. Terkait dengan perubahan struktur organisasi tersebut, hal yang sudah dilakukan adalah dengan melakukan perubahan Renstra pada awal tahun 2017. Hal ini menjadi relevan dan *urgens* sehingga memerlukan energi ekstra bagi seluruh personil Bappeda untuk dapat memberikan arah yang benar untuk mendukung pencapaian Visi Misi Tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja pelayanan OPD, jika dilihat dari pencapaian indikator kinerja dan SPM sudah mampu dipenuhi dan dilaksanakan. Pencapaian dari segi kuantitas sudah dapat dicapai tetapi masih perlu dikaji lagi tingkat pencapaian dari segi kualitas dokumen yang dihasilkan. Sinkronisasi antar dokumen perencanaan pembangunan mulai dari RPJPD, RPJMD, dan RKPD serta sinkronisasi antar dokumen perencanaan pembangunan yaitu RTRW dan RDTRK. Serta perlu dilihat juga sinkronisasi antar dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan dokumen perencanaan ruang, dimana RTRW dijadikan sebagai bahan telaahan dalam penyusunan RPJMD. Melihat hasil evaluasi kinerja pelayanan SKPD, pencapaian indikator kinerja dan SPM sudah mampu dipenuhi dan dilaksanakan. Pencapaian dari segi kuantitas sudah dapat dicapai tetapi masih perlu dikaji lagi tingkat pencapaian dari segi kualitas dokumen yang dihasilkan. Sinkronisasi antar dokumen perencanaan pembangunan mulai dari RPJPD, RPJMD, dan RKPD serta sinkronisasi antar dokumen perencanaan pembangunan yaitu RTRW dan RDTRK.

Isu SDGs (*Sustainable Development Goals*) sebagai kelanjutan paska agenda MDGs yang menjadi isu nasional secara tidak langsung akan mendorong daerah khususnya Kota Magelang untuk mengintervensi kegiatan yang mendukung dalam pencapaian target MDGs yang ditargetkan tuntas pada tahun 2016. Bappeda sebagai *leading sector* perencanaan pembangunan di daerah memiliki peran penting dalam perencanaan kegiatan yang mendorong pencapaian target tersebut. Evaluasi terhadap capaian tiap tahunnya juga diperlukan untuk mengetahui sejauh mana target yang telah dicapai sebagai dasar perencanaan tahun berikutnya.

Beberapa isu baik yang bersifat lokal, regional maupun nasional yang telah tercover di dalam dokumen RKPD Kota Magelang Tahun 2018 juga harus terkawal baik termasuk dalam hal penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasinya juga harus mendapatkan alokasi yang proporsional. Isu-isu tentang kemiskinan, ketimpangan pendapatan dan wilayah serta implementasi Masyarakat Ekonomi ASEAN dan kelanjutan implementasi post MDGs yaitu Sustainable Development Goals (SDGs) juga tidak boleh luput dari kawalan perencanaan di tataran Kota Magelang. Pengendalian dan evaluasi atas implementasi Magelang Kota Sejuta Bunga serta Monev pelaksanaan Smart City dan untuk direncanakan pada tahun perencanaan.

ASEAN Economic Community atau Masyarakat Ekonomi ASEAN yang telah dilaksanakan pada Desember 2015 perlu dilakukan implementasi baik oleh pemerintah pusat maupun daerah. Adanya kebebasan arus barang, jasa dan modal memiliki keuntungan dan kerugian tergantung bagaimana kita memposisikan diri kita. Promosi dan pemasaran produk bisa menjadi sangat luas ketika produk tersebut mempunyai keunggulan kompetitif dan akan menjadi bumerang ketika produk tersebut tidak mampu bersaing dengan pasar. Jika hal ini, kita akan semakin terpuruk karena kita hanya akan berperilaku konsumtif tanpa memproduksi apapun. Untuk itu diperlukan antisipasi dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN ini. Kota Magelang telah menyiapkan Rencana Aksi Daerah dalam rangka antisipasi Masyarakat Ekonomi ASEAN ini tinggal bagaimana implementasi terhadap rencana aksi dimaksud.

Peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemenuhan pelayanan dasar harus tetap berfokus pada penurunan angka kemiskinan, pengurangan pengangguran dan penciptaan lapangan kerja, peningkatan akses pelayanan kesehatan. Terkait dengan isu kemiskinan Kota Magelang yang harus terus di kawal dalam pengentasannya masih sangat strategis untuk di koordinir perencanaannya. Untuk itu perlu ditinjau kembali dokumen yang sudah ada saat ini untuk dapat dilakukan review dan perubahan yang menyesuaikan dinamika kemiskinan Kota Magelang.

Hal lain yang menjadi isu dalam perencanaan pembangunan daerah adalah pengembangan Kota Cerdas yang berdaya saing dan berbasis teknologi dan budaya lokal. Pengembangan kota Cerdas ini berujung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat serta dalam rangka penguatan daya saing dan kemandirian daerah, pengembangan Branding Kota Magelang serta upaya untuk menciptakan iklim

kondusif yang mendukung peningkatan investasi daerah yang di dukung dengan peningkatan kreativitas dan penguasaan pengetahuan dan teknologi

Jalinan kemitraan antara Pemerintah, Masyarakat dan Pihak swasta masih menjadi isu yang sejalan dengan Tema Pembangunan dalam RPJMD Tahun 2016-2017, di mana dengan jalinan kemitraan ini Pemerintah akan mencoba untuk bersama-sama dalam menyusun perencanaan, melaksanakan pembangunan, menyelesaikan permasalahan – permasalahan pembangunan yang nantinya secara bersama – sama akan mencapai tujuan daerah sebagaimana ada pada dokumen – dokumen perencanaan. Peningkatan peran serta masyarakat menjadi penting serta mewujudkan keadilan dan pemerataan hasil pembangunan tanpa adanya diskriminasi

Hal lain yang masih menjadi isu sejalan dengan prioritas Nasional maupun prioritas provinsi adalah Penguatan reformasi birokrasi, yang meliputi beberapa bidang di antaranya : a). peningkatan tata kelola pemerintahan; b). pengelolaan aset daerah; c). peningkatan kualitas layanan publik; d). penataan organisasi; e). Penataan tata laksana; f). Penataan Sistem Manajemen SDM aparatur; g). Penguatan Pengawasan dan h). Penguatan akuntabilitas Kinerja.

Dalam rangka mencapai misi Kota Religius, penciptaan dan pemeliharaan stabilitas daerah menjadi satu hal yang penting mengingat *impact* dari masyarakat religius adalah menurunnya angka kriminalitas serta terciptanya dan terpeliharanya stabilitas daerah, keamanan dan ketertiban. Tujuan akhir dari terciptanya masyarakat religius sebagaimana terdapat dalam dokumen RPJMD adalah menyiapkan landasan masyarakat madani yang harmonis dan kolaboratif berlandaskan tata nilai religius dan mewujudkan kondusivitas iklim kebebasan beragama dan beribadat menuju tata kehidupan kota yang tertib, aman dan nyaman.

Beberapa permasalahan yang dihadapi pada penyelenggaraan urusan perencanaan pembangunan di antaranya terkait dengan a). Sinergisitas proses perencanaan pembangunan daerah dari pendekatan politik (proses politik) ke pendekatan teknokratik perlu dilakukan dengan pemahaman yang sama antara lain terkait perumusan pokok-pokok pikiran DPRD. b). Adanya ego atau kepentingan antarsektor yang mengakibatkan adanya kesulitan dan miskoordinasi. Disamping itu persoalan yang bersifat lintas sektor seringkali ditangani secara parsial dan terfragmentasi sehingga cenderung tidak menyentuh atau menyelesaikan persoalan yang sebenarnya; c). Perlunya pemahaman yang sama di OPD terkait urgensi dan signifikansi perencanaan pembangunan daerah beserta indikator-indikator keberhasilan di masing-masing urusan yang diemban pada setiap level struktural. Hal ini akan meningkatkan fokus pencapaian indikator sebagai garda depan perencanaan dan penganggaran, bukan perencanaan penganggaran yang *incremental*; d). Perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah yang belum konsisten yang perlu terus dilakukan minimalisasi deviasi, antara lain dengan integrasi sistem informasi perencanaan, penganggaran dan evaluasi; e). Proses perencanaan teknokratik yang berbasis pada data sekunder dan primer, baik dari

hasil monitoring dan evaluasi maupun hasil kajian/ telaahan, dianggap masih belum memadai sehingga kekuatan data dan informasi dalam memproyeksikan arah pembangunan berikutnya masih lemah; f). Masih terdapat kesulitan untuk memastikan adanya konsistensi antara perencanaan (program/ kegiatan) pembangunan dan alokasi penganggarnya; dan, g). Perlunya optimalisasi monitoring dan evaluasi hasil Renja SKPD maupun RKPD sehingga tahapan dan isu permasalahan antara bisa disolusikan bersama SKPD dan Bappeda serta implemantasi *e-Monev* untuk kecepatan dan keakuratan serta ketertelusuran progress pelaksanaan Renja maupun RKPD.

Beberapa hal yang perlu menjadi perhatian dalam pencapaian tujuan dan sasaran perencanaan pembangunan di antaranya terkair dengan Pengembangan manajemen sistem data dan informasi secara terpadu dan akurat, perlunya upaya untuk meluaskan cakupan jenis pelayanan pemerintahan dan pelayanan publik yang menggunakan aplikasi teknologi informasi serta meluaskan jangkauan akses partisipasi publik dalam proses pembangunan kota yang menggunakan aplikasi teknologi informasi. Pelayanan berbasis teknologi informasi dalam rangka mendukung smart city dan dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih besar pada kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat.

Untuk melaksanakan dan pencapaian kinerja atas hal tersebut diatas dibutuhkan kapasitas sumber daya manusia aparatur perencanaan di Bappeda yang berkualitas dengan kuantitas yang cukup harus disiapkan dengan baik. Oleh karena itu skenario Workshop perencanaan daerah akan tetap menjadi strategis. Selain itu sosialisasi bagi seluruh personil Bappeda dan para Kasubbag program tentang update dan implementasi atas aturan regulasi terkini harus tetap dilaksanakan secara periodik. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan Sumber daya perencanaan di Kota Magelang

Untuk mengawal isu dan *core business* perencanaan tersebut diperlukan skenario peingkatan kapasitas personil perencanaan Bappeda Kota Magelang. Selain itu kebutuhan akan sarana prasarana kantor baik berupa peralatan perlengkapan maupun kantor yang kondusif dan nyaman untuk mendukung kinerja perencanaan juga harus dipertimbangkan untuk direncanakan.

2.4. Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah salah satu acuan OPD dalam penyusunan Renja OPD, selain RENSTRA OPD. RKPD disusun dalam rangka sinkronisasi pembangunan daerah. Oleh karenanya rancangan awal RKPD seyogyanya diketahui secara umum oleh seluruh OPD untuk dapat disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan OPD terkini.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang kemudian mereview rancangan awal RKPD yang disandingkan dengan kebutuhan OPD dengan hasil bahwa program dan kegiatan yang terdapat dalam Renja OPD sudah tercantum semua dalam rancangan awal

RKPD. Review terhadap rancangan awal RKPD dilakukan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra SKPD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh OPD, dengan arahan kepala daerah terkait prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap SKPD berdasarkan rancangan awal RKPD.

Review terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan untuk OPD yang bersangkutan.

Rancangan awal Perubahan RKPD pada Bab II Sub Bab Permasalahan Pembangunan, beberapa permasalahan utama yang dihadapi dalam pelaksanaan Permasalahan yang dihadapi pada penyelenggaraan urusan perencanaan pembangunan yaitu:

- a. Sinergisitas proses perencanaan pembangunan daerah dari pendekatan politik (proses politik) ke pendekatan teknokratik perlu dilakukan dengan pemahaman yang sama antara lain terkait perumusan pokok-pokok pikiran DPRD.
- b. Perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah yang belum konsisten yang perlu terus dilakukan minimalisasi deviasi, antara lain dengan integrasi sistem informasi perencanaan, penganggaran dan evaluasi.
- c. Perlunya pemahaman yang sama di SKPD terkait urgensi dan signifikansi perencanaan pembangunan daerah beserta indikator-indikator keberhasilan di masing-masing urusan yang diemban pada setiap level struktural. Hal ini akan meningkatkan fokus pencapaian indikator sebagai garda depan perencanaan dan penganggaran, bukan perencanaan penganggaran yang inkremental.
- d. Masih terdapat kesulitan untuk memastikan adanya konsistensi antara perencanaan (program/kegiatan) pembangunan dan alokasi penganggarnya.
- e. Perlunya optimalisasi monitoring dan evaluasi hasil Renja SKPD maupun RKPD sehingga tahapan dan isu permasalahan antara bisa disolusikan bersama SKPD dan Bappeda serta implementasi E-Monev untuk kecepatan dan keakuratan serta ketertelusuran progress pelaksanaan Renja maupun RKPD.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Hingga Triwulan II Tahun 2017 ini tidak ada usulan program kegiatan yang berasal dari masyarakat yang diusulkan melalui Bappeda Kota Magelang.

